

E-PAPER DPR-RI

PERPUSTAKAAN DPR-RI

Follow us: @perpustakaan DPR-RI

No.	Judul	Surat Kabar	Hal.
1.	Mereka yang Memilih Mudik Lebih Awal	Kompas	15
2.	Cacat Logika Regulasi Media Sosial	Kompas	7
3.	Bantargebang, Sampah Bukan soal TPA	Kompas	7
4.	Dari Hormuz ke APBN: Harga Perang bagi Indonesia	Kompas	6
5.	Dari Cuti Bersama hingga WFA, Bagaimana Dampaknya terhadap Arus Mudik Lebaran?	Kompas	13
6.	Survei Litbang Kompas: Mudik Lebaran, antara Optimisme dan Kekhawatiran Masyarakat	Kompas	-
7.	Mudik Lebaran sebagai Retret Sosio-spiritual	Kompas	7
8.	Diskon Tarif Tol 30 Persen Belum Sepenuhnya Menarik Pemudik	Kompas	-
9.	Kendaraan Pemudik yang Tinggalkan Jakarta Baru 25 Persen	Kompas	-
10.	Bonus Hari Raya dan Kerentanan Struktural Ojol	Kompas	6
11.	AS-ISRAEL SERANG IRAN, Perang yang Kotor	Kompas	6
12.	Indonesia Tanpa Migas, Mungkinkah?	Kompas	6
13.	MBG Dilindungi, Pendidikan Dipertaruhkan	Kompas	8
14.	Sertifikasi Guru Setengah Hati	Kompas	6
15.	KPK kebut penyidikan kasus kuota haji	Rakyat Merdeka	15
16.	Menekan Sampah Pangan	Kompas	7
17.	Penutupan Selat Hormuz dan Perang Berlarut Iran-AS-Israel	Kompas	7
18.	Menanti Perlindungan Nyata Anak di Ruang Digital	Kompas	-
19.	Menanti Perlindungan Nyata Anak di Ruang Digital	Kompas	-
20.	KASUS ANDRIE YUNUS:Teror Kebebasan Berekspresi	Kompas	-
21.	Komisi III Minta Polisi Buru Aktor Intelektualis Penyiraman Air Keras Aktivis Kontras, Andrie Yunus	Kompas	15
22.	Siapa yang Melindungi Para Aktivis?	Kompas	-
23.	DPR Bentuk Panja Kawal Pengusutan Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus hingga Tuntas	Kompas	-
24.	Perbedaan Inisial Penyerang Andrie Yunus Bukan Hal Sepele, DPR Akan Panggil TNI-Polisi	Kompas	-
25.	Komisi III DPR: Kasus Andrie Yunus Contoh Nyata "Kerja Kotor" Oknum Institusi Negara	Kompas	4
26.	Apa Perkembangan Penanganan Hukum Anggota TNI yang Menyiramkan Air Keras kepada Andrie Yunus?	Kompas	-
27.	Penataan Ruang Digital untuk Generasi Masa Depan	Kompas	-
28.	MINUMAN BERPEMANIS: Melarutkan Janji Cukai MBDK	Kompas	7
29.	Ibadah Haji Tidak untuk Digantikan	Kompas	6
30.	Menakar Dampak WFH untuk Penghematan Bahan Bakar Minyak	Kompas	13
31.	Benarkah Anak Mudah Terpapar Konten "Dewasa" di Media Sosial?	Kompas	-
32.	Mengakhiri Pejabat Pensiun Seumur Hidup	Kompas	7
33.	Makan Siang sebagai Kurikulum Tersembunyi	Kompas	7
34.	Efisiensi Energi, DPR Batasi Penggunaan Listrik hingga Jamuan Rapat	Kompas	-
35.	Sebanyak 3.500 Tentara AS Tiba di Timur Tengah, Iran Tak Gentar	Kompas	-
36.	Sanksi Tegas bagi Perusahaan Media Sosial	Kompas	6
37.	Jejak "Oil Boom" dan Rapuhnya Ketahanan Energi Indonesia	Kompas	-
38.	DPR Buka Opsi Bentuk Pansus Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus	Kompas	2
39.	PERANG AS-ISRAEL DAN IRAK, Disrupsi Rantai Pasok Minyak Indonesia dalam Perang Global	Kompas	6
40.	PERANG AS-ISRAEL DAN IRAK, Disrupsi Rantai Pasok Minyak Indonesia dalam Perang Global	Kompas	6
41.	Kelompokan Hukum Internasional Hadapi Perang	Kompas	6
42.	Mengapa Indonesia Sebaiknya Keluar dari BoP?	Kompas	-

43.	TRANSPORTASI: Pembatasan BBM Bersubsidi dan WFH Akan Gerus Omzet Pengemudi Ojol	Kompas	9
44.	Varian Baru Covid "Cicada" Sangat Bermutasi, Kemenkes Pastikan Belum Ditemukan di Indonesia	Kompas	8
45.	PENYAKIT MENULAR: Penularan Campak Merebak, Usia Dewasa Juga Perlu Divaksin	Kompas	-
46.	Kalkulasi Mahalnya Harga Politik BBM	Kompas	3
47.	Motor Listrik Kian Relevan di Tengah Fluktuasi Harga Minyak	Kompas	13
48.	Perppu Pemilu Bukan Pilihan	Kompas	7
49.	Bagaimana MRT Membentuk Penumpang yang Beretika?	Kompas	-
50.	Partai Politik Rental	Kompas	7
51.	Mengapa Membuat Anak Senang Membaca Penting?	Kompas	-
52.	Membaca Ulang Fungsi Teritorial dan Ruang Gelap Intelijen	Kompas	6
53.	Pemerintah Jaga Kenaikan Harga Tiket Pesawat Terbang di 9-13 Persen	Kompas	1
54.	KA Bangunkarta Anjlok di Brebes, Sejumlah Perjalanan Kereta Api Dialihkan ke Jalur Utara	Kompas	11
55.	Momentum Memperkuat Ketahanan Energi	Kompas	6
56.	Manusia Usir Kesepian dengan AI	Kompas	8
57.	Manusia Usir Kesepian dengan AI	Kompas	8
58.	"New Normal" Pariwisata, Indonesia Bisa Apa?	Kompas	-
59.	Efisiensi Maskapai: "Reschedule" hingga Pembatalan Penerbangan	Kompas	10
60.	Lulusan Perguruan Tinggi Indonesia di Pasar Kerja Global Masih Minim	Kompas	5
61.	Teror, Ketakutan dan Perusakan Demokrasi	Kompas	-
62.	Pemerintah Pacu Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik	Kompas	1
63.	Pemerintah Pacu Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik	Kompas	1
64.	Lompatan 100 GW Menuju Kedaulatan Energi	Kompas	7
65.	Dana Desa dan Transfer Daerah Dipotong Lagi untuk Cicilan Koperasi Merah Putih	Kompas	10
66.	"Redaksi Yth": Kontroversi Deforestasi	Kompas	7
67.	"Siluman" Regulasi Gula Merongrong Swasembada	Kompas	10
68.	HARI FILM NASIONAL KE-76, Pengarsipan Lemah, Ribuan Sinema Klasik Musnah dan Rusak Dimakan Usia	Kompas	5
69.	Kementerian Komdigi Konsisten Awasi Platform	Kompas	-
70.	Pemenuhan Gizi di Indonesia, Bukan Soal Mampu atau Tidak	Kompas	-
71.	Setelah Whip Pink, BPOM Kembali Temukan "Gas Tertawa" Ilegal dengan Merek Baby Whip	Kompas	-
72.	Redaksi Yth": Berorientasi pada Hasil	Kompas	7
73.	Seberapa Urgen Imunitas bagi Pengawas "Wakil Tuhan"?	Kompas	3
74.	Sensus Ekonomi 2026 dan Jalan Panjang UMKM Naik Kelas	Kompas	8
75.	Tata Kelola Nikel dan Taruhan Keberlanjutan	Kompas	13
76.	Anggaran Dipangkas untuk Koperasi Merah Putih, Proyek Pembangunan Desa Terpaksa Ditunda	Kompas	11
77.	Harga Beras Naik Gegara Lonjakan Harga Plastik dan Gabah	Kompas	10
78.	ADHD Sering Tak Disadari hingga Dewasa	Kompas	-
79.	Menjaga Stabilitas Rupiah di Tengah Konflik Global	Kompas	7
80.	Mural untuk Andrie Yunus	Kompas	3
81.	Jalan Tol Sicincin-Bukittinggi Ditargetkan Mulai Dibangun Akhir 2026	Kompas	-
82.	Mengapa Kenaikan Harga Bahan Baku Plastik Mengkhawatirkan?	Kompas	-
83.	Intelijen dan Paradoks Kekerasan	Kompas	7
84.	Krisis, Histerisis, dan Stabilitas Ekonomi	Kompas	6
85.	Kala Asa Pembangunan Desa Terpotong Gunting Anggaran	Kompas	11
86.	Harga Plastik Meroket, Es Teh hingga Ayam Geprek di Semarang Ikut Naik Harga	Kompas	-
87.	(Tanpa) Wadah Beras	Kompas	-
88.	Mendiktisaintek: Tak Boleh Ada Toleransi Kekerasan Apa Pun di Kampus, Termasuk Seksual	Kompas	-
89.	ADHD dan Tantangan Penanganan yang Masih Terbatas	Kompas	-
90.	Proyeksi 2026, Ekonomi RI dalam Tekanan	Kompas	10
91.	Insentif Fiskal, Kunci Adopsi Elektrifikasi	Kompas	13
92.	Strategi Perusahaan Logistik di Tengah Ketegangan Geopolitik	Kompas	-
93.	Gejolak Geopolitik, Produksi dan Ekspor Industri TPT Tertekan	Kompas	-
94.	Menguji Argumen "Bank Dunia" Versus "Menteri Purbaya"	Kompas	7

95.	Akankah Suplai Minyak Rusia Menjadi Penyelamat RI?	Kompas	-
96.	Menyoal	Kompas	-
97.	Draf Revisi UU Pemilu Belum Tuntas Disusun, Benarkah DPR Tengah Mengulur Waktu?	Kompas	-
98.	Pemerintah Targetkan Perdagangan Karbon mulai Juni 2026	Kompas	9
99.	Pemerintah Targetkan Perdagangan Karbon mulai Juni 2026	Kompas	9
100.	Krisis Energi: Saatnya Bertumpu pada Angkutan Umum	Kompas	-
101.	Langkah Gambit Hilirisasi Semikonduktor Nasional	Kompas	6
102.	Menjadikan Kereta Api Tumpuan Logistik, Akankah Sekadar Angan?	Kompas	-
103.	Kita adalah Manusia-manusia Plastik	Kompas	17
104.	Tekanan Makro dan Geopolitik Bayangi Penjualan Mobil pada 2026	Kompas	9
105.	Potensi Jalan Tol Baru dan Dilema Minat Investasi	Kompas	15
106.	Capai Rp 250.000 Per Tabung, Warga Keluhkan Lonjakan Harga Elpiji	Kompas	-
107.	Tantangan Baterai dan Jaringan Transmisi di Balik Era Energi Surya	Kompas	-
108.	Membangun Kemandirian di Daerah Rawan Tengkes	Kompas	13
109.	Darurat Ruang Aman di Kampus, Jangan Lagi Ada Impunitas Kekerasan Seksual	Kompas	-
110.	Penertiban Terus Dilakukan, Mengapa Pelintasan Liar Kereta Api Terus Bermunculan?	Kompas	11
111.	Angkutan Umum, Solusi Krisis Energi yang (Sering) Dilupakan	Kompas	7
112.	Mencari Skema Terbaik Penyelenggaraan Jalan Tol	Kompas	-
113.	Meski Didesak Merevisi UU Peradilan Militer, Baleg DPR Belum Berencana Membahasnya	Kompas	-
114.	Jika Harga Minyak Tetap Tinggi, Pertamina Berpotensi Naik	Kompas	10
115.	Batal Diskorsing, Pelajar di Purwakarta yang Ejek Gurunya Didampingi Psikolog Tiga Bulan	Kompas	-
116.	Akal Imitasi Kian Mampu Hadirkan Realisme Tingkat Tinggi, Waspada Perang Informasi	Kompas	-
117.	Pencarian Korban Longsor Cisarua Sangat Menantang, Apa Saja Kendalanya?	Kompas	-
118.	KUHAP Baru Persulit Terdakwa Miskin	Kompas	-
119.	Menafsir OTT, Mendiskreditkan Pilkada Langsung	Kompas	6
120.	Mengapa Wisata Olahraga Sekarang Diminati?	Kompas	-
121.	Mengapa Wisata Olahraga Sekarang Diminati?	Kompas	-
122.	Thomas Djiwandono Terpilih, Marwah Independensi BI Kembali Diuji	Kompas	1
123.	Pil Pahit Inosentius "Tergusur" dari Calon Hakim Konstitusi Pilihan DPR	Kompas	2
124.	Energi Hijau di Industri Penerbangan, Seberapa Kuat Gemanya?	Kompas	9
125.	DPR Minta Kasus Jambret Sleman Dihentikan, Tolak Diselesaikan lewat Keadilan Restoratif	Kompas	-
126.	Mengapa Kebijakan MSCI Membuat IHSG Ambrol?	Kompas	-
127.	Penilaian MSCI dan Alarm Kualitas Pasar Modal Indonesia	Kompas	-
128.	Penunjukan Adies Kadir Jadi Hakim MK Dinilai Bermasalah, Bisa Digugat ke PTUN?	Kompas	-
129.	Kedatangan Rafale, Babak Baru Pertahanan Udara Indonesia	Kompas	14
130.	Tantangan NU Memasuki Abad Kedua	Kompas	-
131.	Seleksi dan Sekarat Independensi MK	Kompas	6
132.	Mengapa Buruh Selalu Menuntut?	Kompas	-
133.	Krisis Iklim Memicu Ekstrem Baru, Panas ataupun Dingin	Kompas	-
134.	Mengapa DPR "Menggusur" Inosentius Samsul dengan Adies Kadir untuk Posisi Hakim MK?	Kompas	-
135.	Jerat Dahaga Viralitas dan Ancaman "Grooming"	Kompas	5
136.	Jerat Dahaga Viralitas dan Ancaman "Grooming"	Kompas	5
137.	Pemilu dan Kompetisi yang Setara	Kompas	1
138.	Pemilu dan Kompetisi yang Setara	Kompas	1
139.	Untuk Revisi UU Pemilu, Komisi II DPR Serap Aspirasi Hingga 5 Bulan	Kompas	-
140.	Imbas Anjloknya IHSG, Reformasi Pasar Modal Dipercepat	Kompas	1
141.	Kasus Sleman hingga Es Gabus, Wajah Ganda Penegakan Hukum	Kompas	6
142.	Bagaimana Kelanjutan Kasus Jambret di Sleman?	Kompas	-
143.	Pamor MK Dipertaruhkan DPR	Kompas	3
144.	Dunia Keras Industri Penagihan Utang	Kompas	-
145.	Eks Mafia Jakarta: "Debt Collector" Dulu Kejam Sekali	Kompas	2
146.	Mata Elang, Pekerjaan yang Dicari dan Disangkal	Kompas	2
147.	Alasan Kreditor Pilih "Debt Collector"	Kompas	2
148.	Seusai Bertemu Presiden, Sejumlah Ormas Islam Satu Suara soal Dewan Perdamaian	Kompas	1

149.	Supremasi Sipil dan Ilusi "Hak Veto" Institusi Pemegang Senjata	Kompas	6
150.	Anak SD di NTT Bunuh Diri, Ada Fenomena Lebih Gelap dari Sekadar Tidak Punya Uang	Kompas	-
151.	Indonesia Perlu Pastikan Suara Palestina Terdengar di Dewan Perdamaian	Kompas	1
152.	OTT Hakim di Depok, FSHA Dukung KPK Berantas Praktik Transaksional di Pengadilan	Kompas	-
153.	Gentengisasi dan Imajinasi Estetika Negara	Kompas	-
154.	Pengaturan Rokok Elektronik	Kompas	6
155.	Mewaspada Peningkatan Gugatan Iklim	Kompas	-
156.	Tata Kelola AI di 2026: Apa yang Harus Dipersiapkan Para "Stakeholder"	Kompas	6
157.	Ketika Nipah Mengintai Indonesia	Kompas	6
158.	Bahaya Pengaturan Disinformasi	Kompas	7
159.	Bahaya Pengaturan Disinformasi	Kompas	7
160.	Pertanggungjawaban Korporasi Pasca-KUHP dan KUHP Baru	Kompas	6
161.	Kepercayaan, Ujian Terberat Pasar Modal	Kompas	6
162.	Meniti Arah Kebijakan Adopsi Mobil Listrik	Kompas	6
163.	Presiden, Kearifan Lokal, dan Transdisiplin	Kompas	7
164.	"Nexus" Iman-Iklim-Kuangan: Alarm Keberlanjutan Zaman Ini	Kompas	6
165.	"Malanutrisi" Anggaran Kesehatan Nasional	Kompas	8
166.	Membangun 10 Universitas Baru: Solusi atau Ilusi?	Kompas	6
167.	Pelajaran dari Jepang Membangun Ekosistem Kendaraan Ramah Lingkungan	Kompas	5
168.	Paradoks Membaiknya Data Kemiskinan dan Kisah Pulu Siswa SD di Ngada	Kompas	-
169.	Tragedi Ngada: Alarm Sunyi Kemiskinan Ekstrem	Kompas	-
170.	Tragedi Ngada: Alarm Sunyi Kemiskinan Ekstrem	Kompas	-
171.	ASN "Tukin Sultan", tapi Korupsi, Mengapa Bisa Terjadi?	Kompas	2
172.	Ujian Esensi Kemerdekaan Pers	Kompas	3
173.	Watak Korporatokrasi pada Pencabutan Izin di Sumatera	Kompas	6
174.	Watak Korporatokrasi pada Pencabutan Izin di Sumatera	Kompas	6
175.	Watak Korporatokrasi pada Pencabutan Izin di Sumatera	Kompas	6
176.	Watak Korporatokrasi pada Pencabutan Izin di Sumatera	Kompas	6
177.	Survei Litbang "Kompas": Realitas dan Harapan Pengemudi Ojek Daring demi Bertahan Hidup	Kompas	-
178.	Pendapatan Rendah dan Beban Berat Ojol	Kompas	1
179.	Pendapatan Rendah dan Beban Berat Ojol	Kompas	1
180.	Pengemudi Ojol, Pekerjaan Sementara yang Terlalu Panjang	Jakarta Post	-
181.	Trump, Dewan Perdamaian, dan Konsolidasi Kekuasaan dalam Tatanan Global	Kompas	7
182.	Mengapa Pengemudi Ojol Sulit Keluar dari Lingkaran Kerja Panjang dan Pendapatan Rendah?	Kompas	-
183.	Menggodok Aturan dan Inisiatif demi Perkuat Kesejahteraan Ojol	Kompas	10
184.	Tidak Ada Makan Siang Gratis	Kompas	6
185.	25 Tahun Otonomi Daerah di Tengah Gejala Resentralisasi, Sederet Masalah Mengintai	Kompas	-
186.	Durasi Masa Kerja Pengemudi Ojol Tak Sebanding dengan Tingkat Pendapatan	Kompas	-
187.	Ekonomi Kerakyatan Menjadi Motor Pertumbuhan 2026	Kompas	-
188.	Lonjakan Pekerja Migran Indonesia di Jepang: Sinyal Baik atau Alarm Kerentanan?	Kompas	5
189.	Lonjakan Pekerja Migran Indonesia di Jepang: Sinyal Baik atau Alarm Kerentanan?	Kompas	5
190.	Swasembada dan Situasi Pangan 2026	Kompas	7
191.	Ketika Negara Tidak Percaya pada Pengetahuan Guru	Kompas	8
192.	Reformasi Versus Reposisi Polri	Kompas	7
193.	Arsitektur Pendidikan Tinggi Indonesia	Kompas	7
194.	Disharmoni Kronis dalam Sistem Kesehatan	Kompas	6
195.	DPR Diminta Prioritaskan RUU Perampasan Aset	Kompas	1
196.	Untuk Pertama Kalinya DPR Panggil MKMK, Ada Apa?	Kompas	2
197.	Analisis Media Sosial Litbang Kompas: Problematika Pengemudi Ojek Daring	Kompas	-
198.	Survei Litbang Kompas: Bayang-bayang Status Kemitraan Semu pada Pengemudi Ojol	Kompas	-
199.	Mengapa Pemutakhiran Data Membuat Kegaduhan Kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan?	Kompas	-
200.	Pilkada Langsung dan Masa Depan Kesetaraan Rakyat	Kompas	-
201.	Meregulasi Hal yang Tak Pasti di Dunia Ekonomi Gig	Kompas	13
202.	KPK Dukung RUU Perampasan Aset demi Pemulihan Kerugian Negara dan Beri Efek Jera Koruptor	Kompas	-

203.	Partai Ramai-ramai Usulkan "Parliamentary Threshold" Naik, Berapa Angka Idealnya?	Kompas	2
204.	Beasiswa LPDP 2026 dan Harapan Kemajuan Industrialisasi Indonesia	Kompas	-
205.	Polemik Alumnus LPDP Berbuntut Pengembalian Dana Beasiswa	Kompas	10
206.	Dari Kasus DS, Pemerintah Seharusnya Punya Peta Jalan Talenta Unggul Beasiswa LPDP	Kompas	1
207.	LPDP: 600 Penerima Beasiswa Terduga Langgar Kontrak	Kompas	-
208.	Mengapa Polemik LPDP Picu Kemarahan Publik?	Kompas	-
209.	Ketika Polemik LPDP Mengalahkan Isu-isu yang Lebih Substantif	Kompas	-
210.	Mengapa Pemerintah Membuat Program Beasiswa LPDP?	Kompas	-
211.	Membenahi Tata Kelola LPDP	Kompas	6
212.	Tenggalamnya Reforma Agraria	Kompas	6
213.	PPPK dan Persoalan Status Kerja Negara	Kompas	7
214.	Menagih Keadilan bagi Buruh Data	Kompas	7
215.	Menggagas Ambang Batas Fraksi	Kompas	6
216.	DPR, MKMK, dan Hakim Konstitusi yang Bermartabat	Kompas	7
217.	Panggilan Moral untuk Pengesahan UU PPRT	Kompas	6
218.	Terampasnya Hak Memperpanjang Paspor, Dehumanisasi Pekerja Migran	Kompas	7
219.	Membaca dan Menata Ulang Kontribusi Alumni LPDP	Kompas	-
220.	Bagaimana Komitmen Pemerintah Daerah di Indonesia terhadap Pembangunan Transportasi Publik?	Kompas	-
221.	Paradoks Pensiun, Saat Masa Istirahat Berubah Menjadi Krisis Finansial	Kompas	-
222.	Otonomi Daerah Berbasis Kebinekaan	Kompas	7
223.	Timteng Guncang, Palestina Merana, dan Sikap Indonesia	Kompas	7
224.	Bagaimana Indonesia Mempersiapkan Pasukan untuk Dikirim ke Gaza?	Kompas	-
225.	Isu Ketenagakerjaan dalam Perjanjian RI-AS	Kompas	7
226.	Indonesia di Tengah Perangkap Realisme Politik Internasional	Kompas	7
227.	Mendesak Reformasi Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis	Kompas	6
228.	Menghitung Ulang Rencana Ekspor Beras	Kompas	7
229.	Relasi Guru dan Orangtua yang Kian Renggang dalam Membrosamai Pendidikan Anak	Kompas	1
230.	Mendesak Reformasi Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis	Kompas	6
231.	Partai Politik Semu	Kompas	1
232.	Otonomi Daerah Berbasis Kebinekaan	Kompas	7
233.	Mengawal Pemilihan Dewan Komisioner OJK	Kompas	6
234.	Mengkhawatirkan Independensi MK	Kompas	6
235.	Adies Kadir, Konservatisme Parpol, dan Seleksi Hakim Konstitusi	Kompas	7
236.	KUHAP Baru Persulit Terdakwa Miskin	Kompas	-
237.	Kaleidoskop 2025, Koreksi Konstitusional dari MK	Kompas	4
238.	KUHP dan KUHP Berlaku 2 Januari, Masyarakat Sipil Deklarasikan Darurat Hukum di Indonesia	Kompas	1
239.	Sejauh Mana Upah Minimum Mampu Memenuhi Standar Hidup Layak bagi Buruh?	Kompas	-
240.	Aturan Polisi Jadi Penyidik Utama di KUHP Berlaku 2 Januari, Apa Saja Konsekuensinya?	Kompas	1
241.	RUU Pemilu dan RUU Pilkada Berpeluang Dibahas lewat Kodifikasi	Kompas	-
242.	Mengapa Publik Khawatirkan KUHP dan KUHP Baru?	Kompas	-
243.	Hasil TKA dan Krisis Berpikir Kritis	Kompas	-
244.	Menebak Peta Jalan Pertambangan Nikel di Tengah Protes Warga Terdampak	Kompas	18
245.	Harga Pilkada Mahal	Kompas	6
246.	Misteri APBN 2026	Kompas	6
247.	Misteri APBN 2026	Kompas	6
248.	Superflu yang Mendunia	Kompas	13
249.	Varian Flu Subklad K Menyebar Seiring Musim Liburan	Kompas	-
250.	62 Kasus Superflu Ditemukan di Indonesia, Kemenkes: Kondisi Masih Terkendali	Kompas	8
251.	KUHP dan KUHP Diberlakukan, Habiburokhman: Selamat Menikmati	Kompas	13
252.	RUU Jabatan Hakim, Semestinya Bukan Sekadar soal Pensiun	Kompas	-
253.	Kala Aktivistis hingga Guru Besar UGM Jadi Sasaran Teror	Kompas	-
254.	Arsip Foto "Kompas": Satu Tahun Perjalanan Program Makan Bergizi Gratis	Kompas	-
255.	Arsip Foto "Kompas": Satu Tahun Perjalanan Program Makan Bergizi Gratis	Kompas	-
256.	Mengapa Pemerintah Menarik Lagi Dana yang Sudah Ditempatkan di Perbankan?	Kompas	-
257.	Kilas Balik Penempatan Dana SAL Pemerintah di Perbankan	Kompas	-

258.	Destinasi Superprioritas dan Manajemen Risiko Bencana	Kompas	7
259.	Destinasi Superprioritas dan Manajemen Risiko Bencana	Kompas	7
260.	Panas Bumi: Energi Terbarukan yang Masih Disalahpahami	Kompas	8
261.	Kaleidoskop Transisi Energi Indonesia 2025: Menyisakan Retak di Tapak	Kompas	7
262.	Mempertanyakan KUHP dan KUHAP	Kompas	6
263.	Mulai Berlaku 2 Januari 2026, KUHP Ramai Digugat ke MK	Indo Pos	2
264.	2026 dan Ancaman Kekacauan Penegakan Pidana	Kompas	7
265.	Berapa Persen Ekonomi Indonesia Akan Tumbuh pada Tahun 2026?	Kompas	-
266.	Bagaimana Hukum Internasional Memaknai Penangkapan Presiden Venezuela oleh AS?	Kompas	-
267.	Bagaimana Hukum Internasional Memaknai Penangkapan Presiden Venezuela oleh AS?	Kompas	-
268.	Apa Alasan AS Menyerang Venezuela dan Menangkap Presiden Maduro?	Kompas	-
269.	Venezuela dan Wajah Baru Imperialisme Global	Kompas	7
270.	Ketika Swasta Ikut Merintis Simpul Transportasi Kawasan Urban	Kompas	10
271.	Penggulingan Maduro Disambut Berbeda Diaspora Venezuela	Kompas	-
272.	Tunjangan Hakim Naik Signifikan, Ketua PT Rp 110,5 Juta Per Bulan	Kompas	1
273.	Satgas DPR di Sumatera dan Pertaruhan Pengawasan Pascabencana	Kompas	-
274.	Kenaikan Tunjangan Hakim Tak Jamin Peradilan Jadi Bersih	Kompas	1
275.	Praktik Pembatasan Angkutan Barang Inkonsisten, Pengusaha Logistik Komplain	Rakyat Merdeka	10
276.	Kampung Haji dan Paradigma Antrean Haji	Kompas	10
277.	Mengapa Perbaikan Ekonomi dan Finansial pada 2026 Paling Diinginkan?	Kompas	-
278.	Berharap Aksi AS Tak Menjadi Preseden	Kompas	6
279.	CN-235, DNA Bandung dalam Operasi Khusus AS di Venezuela	Kompas	-
280.	Serangan AS Ungkap "Hubungan Gelap" Kuba-Venezuela Sejak Castro-Chávez	Kompas	4
281.	Setelah Culik Maduro, AS Revisi Dakwaan soal Kartel Matahari	Kompas	1
282.	Seberapa Menjanjikan Minyak Venezuela?	Kompas	1
283.	Apa yang Membuat Trump Begitu Ingin Menguasai Greenland?	Kompas	-
284.	Manuver Pilkada DPRD	Jakarta Post	7
285.	Geopolitik dan Aroma Minyak di Balik Serbuan AS ke Venezuela	Kompas	6
286.	Diplomasi Indonesia di Tengah Gejolak Venezuela	Kompas	4
287.	Mengapa UU TNI Paling Banyak Diuji di Mahkamah Konstitusi?	Kompas	-
288.	Gaji dan Aksiologi Vonis Hakim	Kompas	7
289.	Mensesneg: Draf Perpres TNI soal Penanggulangan Terorisme Belum Final	Kompas	2
290.	Jejak CN-235 Indonesia, Pernah Dibarter Beras Ketan	Kompas	-
291.	Apa Kata Trump dan Pejabat AS soal Hukum Internasional?	Kompas	-
292.	Apa Kata Trump dan Pejabat AS soal Hukum Internasional?	Kompas	-
293.	Wajah Ganda KUHP bagi Masyarakat Adat	Kompas	-
294.	Pengguna Transportasi Publik Bukan "Warga Kelas Dua"	Kompas	17
295.	Realitas Kaum Urban: "Menua" di Jalan Menuju Ibu Kota	Kompas	17
296.	Mengapa Pansus DPR Harus Segera Menyelesaikan Konflik Agraria?	Kompas	-
297.	Penangkapan Nicolas Maduro dan "Kegilaan" Donald Trump	Kompas	-
298.	Mengapa KPK Tetapkan Eks Menag Yaqut sebagai Tersangka Korupsi Kuota Haji?	Kompas	-
299.	Kronologi Dugaan Korupsi Kuota Haji hingga Penetapan Yaqut Jadi Tersangka	Kompas	-
300.	Jajak Pendapat "Kompas": Publik Tetap Ingin Pilkada Langsung	Kompas	1

